



EVALUASI PASCA PROGRAM DALAM SISTEM PERENCANAAN PROVINSI JAWA BARAT: APLIKASI OPEN GOVERNMENT DATA

Dasapta Erwin Irawan

March 16, 2016

Komite Perencana Provinsi Jawa Barat

Kerangka paparan

1. ABSTRAK
2. PENDAHULUAN
3. PERBAIKAN BERKELANJUTAN
4. SEKILAS TENTANG OGD
5. USULAN SOLUSI

ABSTRAK

Tulisan ini saya buat sebagai refleksi kondisi dokumen perencanaan secara umum (tidak terbatas RKPD saja). Berawal dari pengalaman sulitnya mendapatkan data-data dan informasi hasil kerja tahun-tahun sebelumnya. Pihak Bappeda atau OPD umumnya hanya menyimpan berkas laporan dalam format **docx** bahkan **pdf** yang tidak dapat dengan cepat dianalisis. Data dalam bentuk tabel tidak diarsipkan dengan baik, sehingga data pada akhirnya perlu diketik ulang seluruhnya agar dapat dianalisis. Ide tentang OPEN GOV'T DATA ini berkembang dari kondisi saat ini di dunia yang secara masal memprogandakan bahwa OPEN DATA ADALAH BAGIAN DARI GOOD GOVERNANCE. Demikian ulasan ringkas ini untuk mendapat masukan dari ibu dan bapak. Bila diperlukan saya akan kembangkan slide ini secara naratif untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

PENDAHULUAN

- Dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat mengikuti siklus perencanaan yang telah ditetapkan.
- SHEWHART CYCLE: PLAN, DO, CHECK, ACTION
- SMART PLANNING: SPECIFIC, MEASUREABLE, ACHIEVABLE, RESOURCE AVAILABILITY, TIMELY

- Penyusunan rencana *bottom-up* dinilai sudah cukup bagus dengan mekanisme Pra-Musrenbangda, Musrenbangda (dari tingkat desa/kelurahan), online RKPD, dll.
- Provinsi Jawa Barat telah berupaya agar dokumen perencanaan adalah milik masyarakat.

Kondisi saat ini



Figure 1: Jadwal proses penyusun RKPDP: contoh 2016

PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2015 UNTUK PERENCANAAN 2016



Figure 2: Jadwal proses penyusun RKPDP: contoh 2016



Figure 3: Pemangku kepentingan yang berpartisipasi

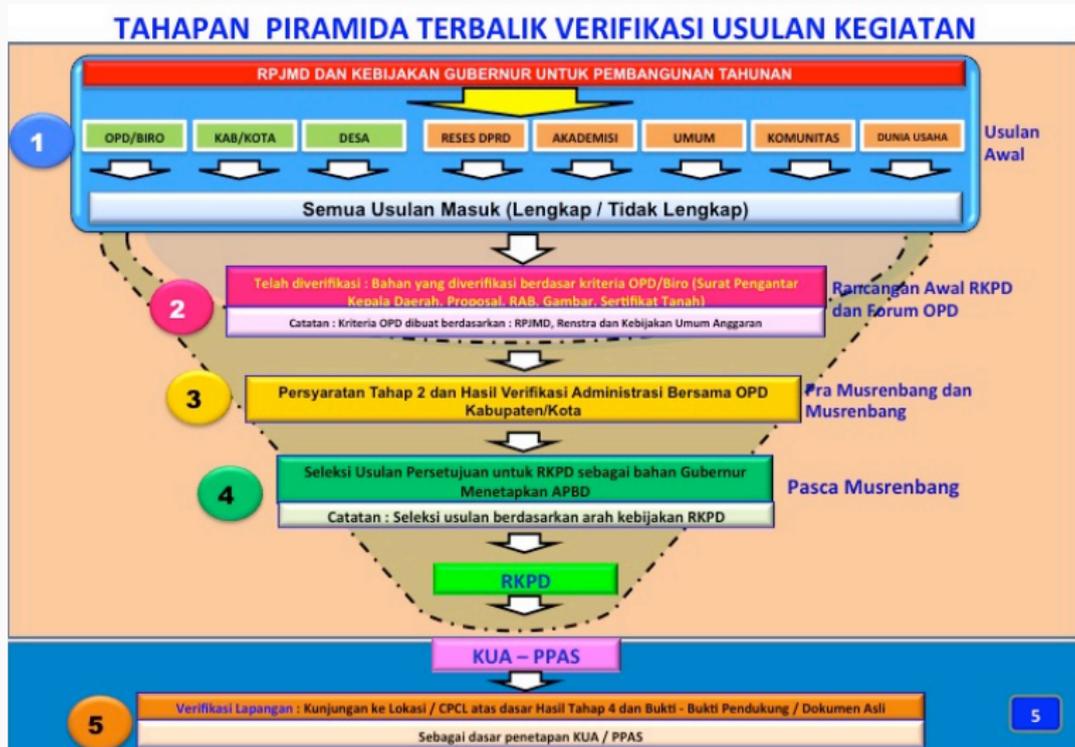


Figure 4: Tahapan verifikasi usulan kegiatan

- Perencanaan: OK, indikator: dok perencanaan tersusun, adanya Pusedalisbang, analisis dasar dan lanjut (regresi dua atau lebih variabel, estimasi, dll) telah dilakukan.
- Implementasi: OK, indikator: dana terserap
- Monitoring: OK, indikator: progres terekam
- Visibilitas: terbatas, indikator: sistem online dengan login terbatas
- Perbaikan berkelanjutan: ?

- Dalam proses perencanaan: OK, indikator: salah satunya adalah dibentuknya Pusdalisbang.
- Dalam proses implementasi: terbatas, indikator: kesalahan pemilihan CPCL
- Dalam proses monitoring: terbatas, indikator: laporan monitoring hanya mudah didapatkan pada tahun berjalan.
- Dalam proses pelaporan: terbatas, indikator: data mentah tidak tersedia.

Kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hal dokumentasi

- notula,
- rekaman A/V,
- website yang terupdate.
- dll

PERBAIKAN BERKELANJUTAN

- Upaya apa yang dilakukan?
- Siapa yang melakukan?
- Kriteria apa yang digunakan?
- Bagaimana penyampaikan kepada para pemangku kepentingan?

Pertanyaan

- Bila program/kegiatan (P/K) selesai, siapa yang wajib melaporkan?
- Bagaimana format laporannya?
- Bagaimana penyimpanannya?
- Bagaimana visibilitasnya?

Data pembangunan OPEN GOV'T DATA (OGD)

- Upaya apa yang dilakukan?
- Siapa yang melakukan?
- Kriteria apa yang digunakan?
- Bagaimana penyampaikan kepada para pemangku kepentingan?

SEKILAS TENTANG OGD

Menurut <http://opengovernmentdata.org>/Working Group
World Bank: Open Gov't Data

- Data yang dihasilkan oleh aktivitas pemerintahan dan diterbitkan oleh instansi pemerintah.
- **Open** yang dimaksud di sini adalah **bebas**: bebas untuk digunakan, dianalisis ulang, dan didistribusikan ke pihak lain.

Delapan kriteria OGD

Menurut *Working Group* tersebut, kriteria OGD adalah:

- *Complete*: data harus lengkap, misal koordinat, waktu (tanggal, jam), obyek dan subyek (penjelasan lokasi, pelaku, dll)
- *Primary*: harus menyertakan data mentah agar dapat dipakai dan dianalisis ulang oleh individu (unit kerja) berbeda pada waktu yang berbeda.
- *Timely*: harus terkini, misal diupdate tiap awal tahun untuk data pembangunan tahun sebelumnya (t-1).
- *Accessible*: dapat diakses secara luas (bergantung kepada jenis data), serta jelas posisi dan lokasi data.
- *Process-able*: format harus mengikuti standar baku agar dapat dibuka dan diproses lebih lanjut sebelum dianalisis.

Mengapa OGD penting?

OGD penting untuk menjamin:

- Transparansi dan kontrol demokrasi
- Partisipasi masyarakat
- Perbaikan sistem yang berkelanjutan
- Inovasi
- Tata kelola yang efisien

Beberapa contoh situs ini adalah sisfo dari berbagai negara. Untuk Jawa Barat disampaikan contoh dari Pusdalibang yang telah menggunakan platform open source STATPLANET yang dipromosikan oleh World Bank:

- India: <https://data.gov.in/>
- Amerika Serikat: <https://www.data.gov/>
- Jawa Barat:
<http://pusdalibang.jabarprov.go.id/tematik/>

USULAN SOLUSI

Beberapa langkah yang perlu dilakukan

Beberapa langkah berikut ini diusulkan agar OGD dapat diaplikasikan secara bertahap:

- Pemilihan data: diusulkan berdasarkan COMMON GOALS agar tidak sektoral. Data dari berbagai OPD dapat disatukan dalam tema COMMON GOALS
- Pemilihan *platform online*:
 - *open source* khususnya untuk data spasial: STATPLANET, GEOSERVER, BOUNDESSGEO.
 - menggunakan *template* peta-peta *opensource*: GOOGLE MAPS, OPEN STREET MAP, dll.
 - membutuhkan piranti keras yang tidak tidak berat
- Pemilihan otoritas login: login bebas dan login terbatas
- Pemilihan web hosting: Diusulkan di Bappeda Jawa Barat agar biaya lebih efisien.

Bila OGD dapat dilaksanakan, maka kegiatan OPD dapat lebih berkesinambungan karena kemungkinan perulangan dapat diperkecil. Evaluasi kondisi eksisting sebagai bahan perencanaan juga akan lebih baik, karena data memiliki lokasi hosting yang tetap dan mudah dicari. Dalam banyak kasus pihak ke-3 yang bekerjasama dengan pemerintah dapat melakukan kajian lebih baik karena bahan dan data-data sebelumnya dapat dengan mudah diambil dan dibaca.

Terimakasih. Apakah ada input dari ibu dan bapak?